



ANDI SUWIRTA

Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya* di Jakarta

IKHTISAR: Artikel ini, dengan menggunakan metode historis dan pendekatan ilmu komunikasi, khususnya analisis isi terhadap media massa, berusaha menjelaskan peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974 dalam pandangan surat-surat kabar “Merdeka” dan “Indonesia Raya” di Jakarta. Surat kabar “Merdeka” dan “Indonesia Raya” dikategorikan sebagai “personal journalism”, yakni isi surat-surat kabar tersebut sangat diwarnai oleh pandangan dari pendiri dan pimpinannya secara pribadi, yakni Burhanuddin Muhammad Diah dan Mochtar Lubis. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun surat kabar “Merdeka” dan “Indonesia Raya” sama-sama menyoroti peristiwa MALARI tahun 1974, dan sebab-sebab terjadinya, dengan kritis; namun ketika pemerintah Orde Baru mengambil tindakan tegas kepada mereka yang dituduh mendalangi peristiwa tersebut, kedua surat kabar di Jakarta itu berbeda pandangan dan kepentingan. Surat kabar “Indonesia Raya” tetap mengkritik dengan keras kepada pemerintah Orde Baru, yang berujung pada pembredelan dan tidak terbit untuk selamanya; manakala surat kabar “Merdeka” terus mendukung pemerintah dan dibiarkan terbit pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998).

KATA KUNCI: Pers dan Kritik Sosial; Surat Kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya*; Peristiwa MALARI 1974; Pemerintah Orde Baru.

ABSTRACT: “Press and Social Criticism in the New Order Era: The MALARI Affairs of 1974 in the Views of *Merdeka* and *Indonesia Raya*’s Newspapers in Jakarta”. This article, using historical methods and communication science approaches, in particular content analysis of the mass media, seeks to explain the events of MALARI (Turmoil of 15 January) in 1974 in the views of “Merdeka” and “Indonesia Raya” newspapers published in Jakarta. The newspapers of “Merdeka” and “Indonesia Raya” were categorized as “personal journalism”, i.e. the content of the newspapers was markedly colored by the views of the founders and their leaders personally, namely Burhanuddin Muhammad Diah and Mochtar Lubis. The results of the study show that although the newspapers of “Merdeka” and “Indonesia Raya” both highlighted the events of MALARI in 1974, and its the causes, were critically; but when the New Order government took firm action against those accused of the master mind of event, the two newspapers in Jakarta differed in their views and interests. The newspaper of “Indonesia Raya” continued to criticize strongly to the New Order government, which led to the bans and did not publish forever; while the newspaper of “Merdeka” continued to support the government and was allowed to be published during the New Order era (1966-1998).

KEY WORD: Press and Social Criticism; Newspapers of *Merdeka* and *Indonesia Raya*; Events of MALARI 1974; New Order Government.

About the Author: Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: suciandi@upi.edu

Suggested Citation: Suwirta, Andi. (2018). “Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya* di Jakarta” in *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Volume 6(1), March, pp.73-98. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808.

Article Timeline: Accepted (March 2, 2017); Revised (October 9, 2017); and Published (March 30, 2018).

PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 Januari 1974, kota Jakarta dilanda kerusuhan massa. Demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kemudian berujung pada aksi huru-hara sosial, yang ditandai dengan pembakaran mobil-mobil Jepang serta penghancuran beberapa gedung, seperti pusat pertokoan di daerah Senen, gedung Toyota Astra, dan *Coca Cola*. Kerusuhan terbesar pertama pada masa awal Orde Baru (1966-1998) itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan peristiwa MALARI atau “Malapetaka 15 Januari” tahun 1974 (Arifin, 1974; Cahyono, 1998; Jazimah, 2013; Lailah, Syah & Syaiful, 2015; dan Khairani, 2016).

Selama kurun waktu enam bulan sebelum terjadinya MALARI tahun 1974, pemerintah Orde Baru menghadapi berbagai kritikan, bukan saja yang dimanifestasikan melalui demonstrasi-demonstrasi oleh para pemuda dan mahasiswa, tetapi juga dalam kegiatan diskusi, seminar, dan ceramah yang datang dari kalangan intelektual dan politisi (Suseno, 1997; Siregar, 1998; dan Fatah, 1999). Dalam hal ini tidak dapat dikesampingkan juga peranan pers, terutama media cetak dan surat kabar, yang ikut memanas situasi melalui pemberitaan-pemberitaan yang diturunkannya (Raillon, 1985; Said, 1988; Abar, 1995; Haryanto, 2006; dan Padiatra, 2012).

Pemerintah Orde Baru (1966-1998) dibangun di atas puing-puing kehancuran ekonomi, yang diwariskan oleh pemerintah Orde Lama (1959-1966). Pemerintahan Orde Baru, dengan demikian, hadir dengan setumpuk tugas maha berat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang telah banyak diabaikan pada zaman-zaman sebelumnya, yakni sejak zaman Revolusi Indonesia (1945-1950), zaman Demokrasi Liberal (1950-1959), dan zaman Demokrasi Terpimpin

(1959-1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, yang sering disebut juga sebagai zaman “Orde Lama” oleh pemerintah “Orde Baru” (Poesponegoro & Notosusanto eds., 1985; Ricklefs, 1992; dan Vatikiotis, 1998).

Keadaan perekonomian Indonesia pada masa itu tengah menuju kepada kebangkrutan. Dalam konteks ini, Harold Crouch (1999) menyatakan sebagai berikut:

Pada saat itu, kondisi ekonomi Indonesia berada pada titik paling parah. Inflasi ekonomi terjadi tanpa terkendali. Pada awal tahun 1966, harga membumbung rata-rata sekitar 50% setiap bulan, cadangan pembayaran luar negeri habis, dan pembayaran hutang tahun 1966 mencapai jumlah yang hampir senilai dengan pendapatan ekspor yang diharapkan. Produksi industri jatuh karena ketidakmampuan untuk membiayai impor bahan-bahan baku, sehingga mengharuskan pabrik-pabrik bekerja jauh di bawah kapasitas. Ekspor telah merosot terus selama bertahun-tahun, karena prasarana jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan, dan kemudahan-kemudahan pasar bertambah buruk. Karena daya beli gaji pegawai negeri pun jatuh, sampai pada taraf yang tidak masuk akal, administrasi menjadi bocor oleh bolong-bolong korupsi, dan terjadilah ketidakefisienan yang luar biasa (Crouch, 1999).

Untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia yang tengah menuju kebangkrutan, pemerintah Orde Baru kemudian membentuk suatu tim ekonomi yang terdiri dari para teknokrat UI (Universitas Indonesia) di Jakarta. Di tangan para teknokrat inilah – dengan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro sebagai Ketuanya – dipercayakan pekerjaan untuk merancang dan melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia secara terencana dan berkesinambungan (Mas’oed, 1989; Elson, 2008; dan Mahardhika, 2017).

Sementara itu, ditinjau dari segi politik, permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah Orde Baru, pada awal kelahirannya, ialah

bagaimana menata dan membangun suatu sistem politik yang dapat diandalkan guna memungkinkan penataan pembangunan ekonomi dan bidang-bidang lainnya (Mas'ood, 1989; Cahyono, 1992:66; dan Abdullah & Lopian eds., 2012). Untuk itulah, pemerintah Orde Baru kemudian mengambil langkah-langkah konsolidasi dan membentuk lembaga-lembaga non-institusional, seperti: KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban); ASPRI (Asisten Pribadi Presiden); dan OPSUS (Operasi Khusus). Langkah konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu, salah satunya, adalah “penggarapan” yang dilakukan kepada partai-partai politik melalui OPSUS di bawah pimpinan Ali Moertopo, orang kepercayaan Presiden Soeharto (Siregar, 1998; dan Rahmat, 2011).

Seiring dengan semakin kuatnya kedudukan pemerintah Orde Baru, lembaga-lembaga non-institusional itu pun — terutama ASPRI Presiden dan OPSUS — tumbuh menjadi organisasi yang amat berpengaruh dan percaya diri, disamping karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Bahkan, Heru Cahyono (1998) dengan tegas menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh dukungan dapur pemikiran yang hebat, personalia yang tangguh, organisasi yang relatif rapih, dan dana yang berlimpah-ruah (Cahyono, 1998). Keberadaan dan peran ASPRI Presiden dan OPSUS yang seperti itu, tentu saja, pada gilirannya menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan, bahkan rivalitas antara lembaga-lembaga resmi dengan lembaga yang tidak resmi dalam negara dan pemerintahan Orde Baru (Siregar, 1998; Rahmat, 2011; dan Abdullah & Lopian eds., 2012).

Memasuki tahun 1970-an pula, telah terjadi interaksi yang intens antara pemerinah Orde Baru di satu sisi, dengan mahasiswa dan pers mengenai isu pokok pemberantasan korupsi di sisi

lain (Said, 1988; Abar, 1995; Haryanto, 2006; dan Padiatra, 2012). Pada bulan Januari 1970, misalnya, DM-UI (Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia) di Jakarta melakukan rapat yang membahas kenaikan harga bensin dan soal korupsi. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan demonstrasi secara terorganisir yang bernama “MM atau Mahasiswa Menggugat” (Tasrif *et al.*, 1974; Nindarsari, 1984; dan Siregar, 1998). Gerakan itu ternyata berdampak luas dan diliput oleh pers selama berminggu-minggu (Raillon, 1985; dan Siregar, 1998).

Pemerintah Orde Baru segera bereaksi terhadap gerakan mahasiswa tersebut dengan membentuk “Komisi Empat”, yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohamad Hatta, dimana fokus perhatian diberikan pada pemberantasan korupsi di dua BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yakni PERTAMINA (Perusahaan Tambang Minyak Nasional) dan BULOG (Badan Urusan Logistik). Aksi-aksi yang dimotori oleh para mahasiswa itu kemudian meluas dengan bermunculannya gerakan-gerakan serupa, seperti: KAK (Komisi Anti Korupsi), BB (Bandung Bergerak), KKN (Komite Kebanggaan Nasional), GEMIRI (Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Rakyat Indonesia), AMO (Angkatan Muda Oposisi), dan lain-lain (Raillon, 1985; Noer, 1990; Siregar, 1998; dan Syuraida, 2015).

Keresahan para mahasiswa dan para intelektual lainnya, termasuk pers, terhadap masalah korupsi semakin menjadi-jadi ketika muncul keinginan dari Ibu Negara dan Istri Presiden, Tien Soeharto, untuk memprakarsai proyek pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah).¹ Para mahasiswa

¹Lihat, misalnya, “Ibu Tien dan Letupan-letupan Pemicu MALARI” dalam *TEMPO.CO*. Jakarta: 15 Januari 2014. Tersedia secara online juga di: <https://nasional.tempo.co/read/544935/ibu-tien-dan-letupan-letupan-pemicu-malari> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

menganggap bahwa proyek tersebut tidak pantas dilaksanakan di tengah-tengah kondisi negara yang masih lemah, yakni ketika bangsa Indonesia sedang berusaha untuk bangkit memperbaiki keadaan ekonominya (Raillon, 1985; Siregar, 1998; dan Padiatra, 2015). Terlebih ketika santer terdengar bahwa biaya untuk menyelesaikan proyek TMII tersebut membutuhkan dana sekitar Rp. 10.5 milyar. Dalam pandangan para mahasiswa, proyek TMII itu dianggap tidak jauh berbeda dengan *proyek mercusuar*-nya Presiden Soekarno pada masa Orde Lama, 1959-1966, yang juga ditentang oleh para mahasiswa (Sudarta, 2007; dan Padiatra, 2015 dan 2017).

Situasi perpolitikan di Indonesia semakin panas, ketika di dalam tubuh militer juga terjadi rivalitas yang cukup tajam, terutama antara Jendral Soemitro, selaku Panglima KOPKAMTIB, dengan Mayor Jenderal Ali Moertopo, Staf ASPRI Presiden dan sekaligus merangkap Ketua OPSUS (Rahmat, 2011; Padiatra, 2015). Soemitro berdiri bersama Ketua BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Nasional), Sutopo Juwono, dan Wakil KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), Sajidiman, serta mendapat dukungan yang luas dari perwira-perwira lapangan (Ramadhan, 1994; dan Padiatra, 2015).

Dalam hal ini, Heru Cahyono (1998), dengan mengutip pendapat Brian May (1978), mengemukakan pertentangan itu berkisar mengenai keprofesionalan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), di mana Soemitro berpendapat bahwa ABRI sedapat mungkin harus meninggalkan peran-peran sipilnya yang tidak ada hubungan dengan aspek pertahanan negara; sedangkan Ali Moertopo merumuskan fungsi ABRI yang tangkas dan ulet untuk mengerjakan apa saja yang ditugaskan padanya, termasuk tugas yang tidak ada hubungannya dengan aspek HANRA

atau Pertahanan Rakyat (*cf* May, 1978; Ramadhan, 1994; dan Cahyono, 1998). Ketidakpuasan, bahkan perpecahan dalam kalangan militer, khususnya Angkatan Darat, juga disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah Orde Baru lebih memberikan kedudukan dan kesempatan kepada perwira-perwira yang berasal dari korps Diponegoro di Jawa Tengah, sehingga perwira-perwira yang berasal dari korps Siliwangi di Jawa Barat dan korps Brawijaya di Jawa Timur merasa kedudukannya tersisihkan (Crouch, 1999; Rajab, 2004; dan Jenkins, 2010).

Pertentangan antara Soemitro dengan Ali Moertopo semakin jelas terlihat pada pertengahan tahun 1973, menyusul reaksi keras dari umat Islam atas diajukannya RUU (Rancangan Undang-Undang) Perkawinan, yang menurut Soemitro, RUU ini disusun oleh Ali Moertopo dalam CSIS (*Center for Strategic and International Studies*). Umat Islam di Indonesia menafsirkan bahwa pengajuan RUU ini merupakan bentuk lain dari keinginan golongan Kristen dan nasionalis sekuler untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Pancasila yang betul-betul sekuler. Banyak pasal-pasal dari RUU itu yang bertentangan dengan hukum dalam agama Islam. Di antaranya, pasal yang menyebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata bila perkawinan tersebut dilakukan di hadapan seorang pencatat sipil. Sedangkan menurut ajaran Islam, sahnya suatu perkawinan apabila adanya persetujuan *ijab* dan *qabul*, yang dihadiri oleh dua orang saksi (Rahmat, 2011; Alidar, 2012; dan Padiatra, 2015).

Soemitro, melalui Sutopo Juwono, mengambil alih RUU tersebut. Menurut penuturan Soemitro, dalam memoarnya, pengambilalihan masalah itu merupakan perintah langsung dari Presiden Soeharto. Soemitro dan Sutopo Juwono melakukan pendekatan terhadap umat Islam untuk bersama-

sama menyusun RUU Perkawinan yang baru, sebagai penggantinya (Ramadhan, 1994; dan Alidar, 2012).

Menurut Harold Crouch (1999) dan pengkaji lainnya, dukungan yang diberikan kepada Soemitro, terutama dari kalangan perwira militer, lebih dikarenakan ketidakpuasan perwira-perwira tersebut terhadap sepak-terjang Ali Moertopo beserta OPSUS (Operasi Khusus)-nya, terutama kepada partai-partai politik dan umat Islam (Crouch, 1999; dan Rahmat, 2011). Kerisauan para perwira lapangan itu bukan karena mereka bersimpati kepada umat Islam, tetapi lebih dikarenakan merekalah yang kemudian harus bertanggung jawab atas setiap penindasan terhadap ledakan ketidakpuasan yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Ali Moertopo dengan OPSUS-nya (Ramadhan, 1994; Crouch, 1999; dan Rahmat, 2011).

Serangkaian kegiatan yang bernada kritik terhadap pemerintah Orde Baru semakin gencar dilakukan pada pertengahan 1973, dan semakin memuncak pada tiga bulan terakhir tahun 1973. DM-UI (Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia) di Jakarta menyelenggarakan diskusi dengan tema "Generasi Muda". Diskusi itu menyertakan tiga angkatan, yaitu Angkatan 1928, yang diwakili oleh Soediro; Angkatan 1945, yang diwakili oleh Adam Malik; dan Angkatan Muda, yang diwakili oleh Hariman Siregar dan Cosmos Batubara (Siregar, 1998; dan Padiatra, 2015). Selain itu, hadir juga tokoh-tokoh bekas PSI (Partai Sosialis Indonesia), MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), dan TNI (Tentara Nasional Indonesia), seperti Subadio Sastrosatomo, Sjafruddin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, T.B. (Tahi Bonar) Simatupang, dan banyak lagi yang lainnya (Arifin, 1974; Siregar, 1998; Yogaswara, 2009; dan Padiatra, 2015).

Ceramah dan diskusi yang dipimpin

oleh Drs. Dorodjatun Kuntjorodjakti, dosen muda dari UI Jakarta itu, mengeluarkan "Petisi 24 Oktober 1973". Isi petisi tersebut, menurut Marzuki Arifin (1974), setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, sebagai berikut:

Pada satu pihak menyatakan keprihatinannya pada keadaan saat itu, yaitu adanya ketidakpastian hukum (malah menggunakan kata "perkosaan hukum"), korupsi, penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, pengangguran, serta tidak atau kurang berfungsinya lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat. Sedangkan di pihak lain, petisi ini melihat ke depan, dalam hal ini dianjurkan untuk meninjau kembali strategi pembangunan yang diharapkan baru, di mana terdapat keseimbangan di bidang sosial, politik, dan ekonomi yang anti kemiskinan dan ketidakadilan (Arifin, 1974:105).

Demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ternyata telah menjalar ke beberapa daerah di luar Jakarta dan Bandung. Mahasiswa-mahasiswa di Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Surabaya (Jawa Timur), Ujungpandang atau Makassar (Sulawesi Selatan), dan kota-kota lainnya turut melakukan demonstrasi (Arifin, 1974; Siregar, 1998; dan Padiatra, 2015). Menurut Bambang Sulistomo, salah seorang pelaku dalam peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974, sebagaimana dikutip juga oleh Heru Cahyono (1992) dan Ipong Jazimah (2013), tuntutan-tuntutan yang dikumandangkan oleh para mahasiswa itu menyangkut masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang begitu luas, dengan tuntutan yang paling penting di antaranya adalah: *pertama*, pembubaran ASPRI (Asisten Pribadi) Presiden, khususnya dengan menyerang Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani, yang dianggap terlalu jauh mencampuri tugas-tugas pemerintahan secara langsung; serta *kedua*, menolak para pemodal asing, khususnya Jepang, yang dianggap

hanya mencari keuntungan ekonomi belaka tanpa memperhatikan faktor-faktor sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara tuntutan lainnya adalah penurunan harga, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya (cf Raillon, 1985; Cahyono, 1992:144-145; Jazimah, 2013; dan Padiatra, 2015).

Memasuki bulan November 1973, aksi-aksi protes mahasiswa semakin meningkat. Kedatangan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda dan sekaligus Ketua IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*), J.C. Pronk, tidak luput dari demonstrasi mahasiswa. J.C. Pronk disambut dengan unjuk rasa anti modal asing oleh para mahasiswa UI (Universitas Indonesia) di Jakarta. Mereka juga menyoroti secara tajam mengenai bantuan luar negeri. Hal ini menyebabkan J.C. Pronk harus menyempatkan diri untuk melakukan diskusi dengan para mahasiswa UI di Jakarta, pada tanggal 20 November 1973 (Arifin, 1974; Jazimah, 2013; dan Padiatra, 2015).

Ketika oposisi terhadap pemerintah tengah digalang, Soemitro sebagai PANGKOPKAMTIB (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) tidak mengambil tindakan tegas, ia malah menunjukan sikap yang “simpatik” terhadap gerakan mahasiswa (Ramadhan, 1994; Cahyono, 1998; Siregar, 1998; dan Crouch, 1999). Menurut David Jenkins (2010) dan pengkaji lainnya, situasi saat itu telah dimanfaatkan oleh Soemitro untuk kepentingan dan ambisi politik pribadinya (Cahyono, 1998; Jenkins, 2010; dan Jazimah, 2013). Bahkan, ketika diperintahkan oleh Presiden Soeharto untuk “mengamankan” dunia kampus, Soemitro malah mengunjungi para tahanan politik PKI (Partai Komunis Indonesia) di pulau Buru, kepulauan Maluku (Soeharto, 1989; dan Ramadhan, 1994).

Menurut Pramudya Ananta Toer (1997), hal itu merupakan sebuah tindakan simbolik, yang secara politis mengandung makna bahwa Soemitro lebih manusiawi daripada Soeharto (Toer, 1997). Setelah kunjungannya ke pulau Buru itu, Soemitro kemudian mengunjungi kampus-kampus, yang dimulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di kampus ITB (Institut Teknologi Bandung) dan UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta, misalnya, Soemitro melontarkan tentang perlunya “komunikasi dua arah” (*two way traffic communications*) dan “pola kepemimpinan baru”, yang dijanjikan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974 (Ramadhan, 1994; dan Cahyono, 1998). Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian menimbulkan berbagai penafsiran serta isu tentang akan terjadinya pergeseran besar-besaran dalam struktur pemerintahan, dan juga tentang usaha untuk menjatuhkan Presiden Soeharto (Soeharto, 1989; Abar, 1995; Cahyono, 1998; Crouch, 1999; dan Padiatra, 2015).

Dalam konteks ini, Soemitro menyatakan bahwa tindakannya mengunjungi kampus-kampus merupakan perintah langsung dari Presiden Soeharto. Ia mengatakan lebih lanjut, sebagai berikut:

Pak Harto kemudian bercerita yang sama tentang kampus-kampus yang resah. Presiden juga cerita macam-macam mengenai kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang, yang mendapatkan kritik luas dari kampus-kampus. Ia kelihatan amat prihatin dan minta saya agar mendatangi kampus-kampus dan mengadakan dialog dengan mereka (dalam Ramadhan, 1994).

Sementara itu, mengenai “komunikasi dua arah”, Soemitro menjelaskan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah melalui proses dialog. Jadi, bukan komunikasi satu arah yang bersifat monolog, seperti memberikan pengarahan, instruksi, atau perintah. Pola-pola seperti itu dianggap dapat merusak daya berfikir

inovatif dan kreatif masyarakat. Sedangkan konsep “pola kepemimpinan baru” berarti bahwa seorang pemimpin harus mempunyai orientasi ke bawah, orientasi kerakyatan, dan harus berani berdialog dengan siapapun, bukan berdiri di belakang pangkat dan jabatan mereka (Ramadhan, 1994; dan Cahyono, 1998).

Meskipun Soemitro tidak secara terus-terang mengatakan bahwa kunjungan-kunjungan yang ia lakukan bertujuan untuk mendeskreditkan pemerintah, namun dari pernyataan di atas tersirat bahwa bagaimanapun Soemitro memang mengindikasikan mengenai pemerintah Orde Baru – dalam hal ini Presiden Soeharto – merupakan seorang pemimpin yang monolog dan kaku, serta tidak memiliki orientasi kerakyatan (*cf* McDonald, 1980; Elson, 2001; McGlynn *et al.*, 2007; dan Lasut, 2011). Sementara itu Alfian (1992) dan pengkaji lainnya menyatakan bahwa gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh Soemitro kemudian menjadi suatu landasan moral bagi mahasiswa untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah (Alfian, 1992; Rais, 1986; Cahyono, 1998; Fatah, 1999; dan Lasut, 2011).

Pada bulan Desember 1973, aksi-aksi protes mahasiswa di berbagai kota terus berlangsung dan semakin meningkat. Aksi-aksi tersebut mengkritik politik pembangunan dan berbagai kebijaksanaan ekonomi yang dianggap lebih “menganak-emaskan” golongan non-pribumi daripada golongan pribumi (Muhaimin, 1991; Sjamsuddin, 2002; dan Padiatra, 2015). Kritik tajam juga ditujukan kepada para ASPRI (Asisten Pribadi) Presiden, yang tingkah-laku politik dan ekonominya dinilai buruk dan tercela. Para ASPRI Presiden ini juga dituduh sebagai penyebab terjebaknya perekonomian Indonesia dalam jeratan hutang dan ketergantungan terhadap pemerintah Jepang (Raillon, 1985;

Muhaimin, 1991; Abar, 1995; Siregar, 1998; dan Padiatra, 2015).

Di tengah santernya isu pergantian pemimpin pemerintahan, menyusul tidak efektifnya larangan Laksus (Pelaksana Khusus) KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) untuk tidak melakukan demonstrasi, Presiden Soeharto kemudian mengambil tindakan untuk melakukan dialog dengan mahasiswa – keputusan ini tampaknya diambil untuk menepis anggapan bahwa pemerintah Orde Baru hanya bersifat monolog – pada tanggal 11 Januari 1974 (Soeharto, 1989; Siregar, 1998; dan Padiatra, 2015). Dalam dialog itu, mahasiswa menyampaikan dua deklarasi, masing-masing “Deklarasi Mahasiswa Indonesia”, yang ditandatangani oleh Dewan-dewan Mahasiswa dari Jakarta; dan “Tuntutan Mahasiswa Indonesia”, yang ditandatangani oleh Dewan-dewan Mahasiswa dari Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Sumatra Utara, Banjarmasin, dan Bali (Raillon, 1985; Aly, 2004; Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015).

Namun hasil dialog selama dua jam itu tidak memuaskan para mahasiswa. Para mahasiswa kemudian memutuskan untuk meneruskan aksi-aksi mereka di jalan. Maka, pada tanggal 14 Januari 1974, aksi demonstrasi mahasiswa terjadi di lapangan terbang Halim Perdanakusumah untuk menyambut kedatangan PM (Perdana Menteri) Jepang, Kakuei Tanaka; dan di tempat-tempat lain; serta demonstrasi tersebut ditambah dengan pembakaran patung Kakuei Tanaka dan Soedjono Hoemardhani (Raillon, 1985; Siregar, 1998; Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015).

Di Jakarta, puncak demonstrasi terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Demonstrasi ini difokuskan untuk menentang dominasi modal asing, terutama modal Jepang, dan semua tingkah-laku pengusaha Jepang

yang dianggap tercela dan banyak merugikan bangsa Indonesia (Siregar, 1998; Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015). Selain itu, dalam aksi demonstrasi, mahasiswa juga mengemukakan tiga tuntutan, yaitu: (1) bubarkan ASPRI Presiden; (2) turunkan harga-harga; dan (3) berantas korupsi. Tiga tuntutan itu kemudian dikenal dengan nama TRITURA atau Tiga Tuntutan Rakyat, pada tahun 1974 (Raillon, 1985; Abar, 1995:200; Siregar, 1998; Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015).

Tapi kemudian, demonstrasi damai mahasiswa tersebut berubah menjadi kerusuhan, yang melibatkan ratusan, bahkan ribuan massa, di luar mahasiswa. Demonstrasi damai mahasiswa itu telah dikacaukan dengan “bergabungnya” preman-preman, tukang becak, serta orang-orang miskin yang menjarah dan melakukan pembakaran pada barang-barang yang berbau Jepang. Kerusuhan itu juga berlangsung sampai dengan tanggal 16 Januari 1974 (Siregar, 1998; Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015).

Akibat kerusuhan itu, korban jiwa dan materil tidak dapat terhindarkan. Tercatat dalam peristiwa tersebut: 11 orang meninggal, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan, dan 775 orang ditahan. Sedangkan kerugian materil berupa 807 mobil dan 187 motor rusak atau terbakar; 144 gedung rusak atau terbakar, termasuk juga gedung *Coca Cola*; dan 160 kg emas dinyatakan hilang (Arifin, 1974:165; Siregar, 1998; dan Padiatra, 2015).

Artikel ini, dengan menggunakan metode historis (Notosusanto, 1984; Gottschalk, 1986; Ismaun, 1988; Zed, 2004; dan Sjamsuddin, 2007) dan pendekatan ilmu komunikasi, khususnya analisis isi terhadap media massa (Makah, 1986; Liliweri, 1991; Suwardi, 1993; dan Widjaja, 1993), akan menjelaskan peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974 dalam *news & views* atau berita

dan pandangan surat-surat kabar, khususnya surat kabar yang terbit di Jakarta, yakni *Merdeka* dan *Indonesia Raya*. Pemilihan pada kedua surat kabar tersebut didasarkan pada pertimbangan dua hal, sebagai berikut:

Pertama, surat kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya* di Jakarta sering dikategorikan sebagai *personal journalism*, yakni bahwa *news & views* surat-surat kabar tersebut sangat diwarnai oleh visi, misi, dan pandangan dari pendiri dan pimpinannya secara pribadi, yakni Burhanuddin Muhammad Diah dan Mochtar Lubis (Soebagijo, 1981; Kakiailatu, 1997; dan Hill, 2010). *Kedua*, baik surat kabar *Merdeka* maupun *Indonesia Raya* di Jakarta termasuk pers yang relatif independen, dalam pengertian bukan pers partisan yang menjadi corong dari sebuah partai politik (Taufik, 1977; Chaniago *et al.*, 1986; Said, 1988; Hill, 2011; dan Suwirta, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Sejarah Surat Kabar “Merdeka” dan “Indonesia Raya” di Jakarta. Surat kabar *Merdeka* didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, ketika Indonesia memasuki zaman revolusi, dengan mengambil alih surat kabar *Asia Raya* di Jakarta yang *made in Japan* menjadi surat kabar yang lebih berjiwa “repeblikan” (Chaniago *et al.*, 1986; dan Suwirta, 2000). Pada masa pemerintahan Orde Lama – terutama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) – PKI (Partai Komunis Indonesia) sangat ofensif untuk menguasai pers Indonesia, terutama terhadap pers yang tidak sejalan dengan pemikiran dan kepentingan politik Komunisme. Dalam pandangan PKI, pers adalah alat negara atau partai, yang harus tunduk dan wajib menjalankan segala perintah partai (Taufik, 1977; Chaniago *et al.*, 1986:87; Said, 1988; Hill, 2011).

Untuk menghadang gerak

langkah PKI dalam mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno dan menguasai pers Indonesia, surat kabar *Merdeka* di Jakarta, bersama dengan *Berita Indonesia*, *Indonesian Observer*, *Warta Bakti*, dan beberapa media massa lainnya membentuk kubu pers non-Komunis yang diberi nama BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme), dengan tokoh-tokoh utamanya seperti: B.M. (Burhanuddin Muhammad) Diah, Adam Malik, dan Sumantoro. Namun demikian, BPS beserta surat kabar yang berada di dalamnya, termasuk *Merdeka*, harus menerima pembredelan dari pemerintah pada tanggal 23 Februari 1965 (Taufik, 1977; Soebagijo, 1981; Chaniago *et al.*, 1986; Said, 1988; Kakiailatu, 1997; Said, 1988; Suwirta, 2008; dan Hill, 2011).

Memasuki masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998), surat kabar *Merdeka* diperbolehkan terbit kembali bersamaan dengan surat kabar lainnya, yang mengalami pembredelan pada masa Orde Lama (1959-1966). Dalam bayak hal, *Merdeka* masih merupakan surat kabar yang kritis dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Namun, harus pula diakui bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh surat kabar *Merdeka* di Jakarta itu terkadang dinyatakan dengan bahasa yang kurang berani dan lantang, sehingga dirasakan tidak begitu “menggigit” di mata para pembacanya (Hill, 2011; dan Suwirta, 2017).

Hal ini dapat dipahami bila mengingat terjadinya perseteruan antara Rosihan Anwar dengan B.M. Diah pada tahun 1970-an. Perseteruan tersebut berkisar pada siapa yang paling berhak menjadi pemimpin dalam tubuh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Sidang PWI pada awalnya telah mengambil keputusan untuk mengangkat Rosihan Anwar sebagai Ketua PWI, namun kemudian dengan rekayasa yang dilakukan oleh OPSUS

(Operasi Khusus), kepemimpinan Rosihan Anwar – pemimpin redaksi surat kabar *Pedoman* di Jakarta yang berafiliasi dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia) – digugat dan kemudian dihadapkan dengan B.M. Diah sebagai Ketua PWI, yang direstui oleh pemerintah Orde Baru (Soebagijo, 1981; Anwar, 1983; dan Kakiailatu, 1997). Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau dalam skala tertentu, surat kabar *Merdeka* di Jakarta kurang bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru.

Sementara itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta berdiri pada tanggal 29 Desember 1949, hanya dua hari setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia oleh pihak Belanda (Abdullah ed., 1997; Haryanto, 2006; Suwirta, 2008; dan Hill, 2010). Surat kabar *Indonesia Raya* pernah mengalami dua masa terbit, yaitu pada masa Demokrasi Liberal dan Orde Lama (1949-1958), serta masa Orde Baru (1968-1974). Nama *Indonesia Raya*, menurut Mochtar Lubis, berasal dari Teuku Sjahrir, seorang wartawan yang kebetulan tetangganya. Ia berkata, “*Daripada susah-susah, ambil saja nama lagu kebangsaan kita*”. Begitulah, surat kabar ini kemudian bernama *Indonesia Raya* (dalam Atmakusumah, 1992; Abdullah ed., 1997; dan Hill, 2010).

Sepanjang perjalanan hidupnya, *Indonesia Raya* dikenal sebagai surat kabar yang kritis. Tidak peduli pemerintahan mana yang berkuasa, asalkan melakukan tindakan yang menyimpang, surat kabar *Indonesia Raya* sudah siap sedia dengan jeweran berupa kritikan-kritikan yang berani, dengan bahasa yang lugas, tegas, dan berterus-terang (Taufik, 1977; Soebagijo, 1981; Abar, 1995; Abdullah ed., 1997; Haryanto, 2006; Suwirta, 2008; dan Hill, 2010 dan 2011).

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila surat kabar

Indonesia Raya di Jakarta pernah mengalami 7 kali pembredelan. Enam kali pada masa terbit pertama (1949-1958) dan satu kali, tetapi sangat fatal, pada masa terbit kedua (1968-1974). Selama masa terbit pertama, lima wartawannya pernah ditahan antara beberapa hari dan sebulan, sedangkan Mochtar Lubis ditahan di rumah dan dipenjarakan hampir terus-menerus selama sembilan tahun. Dan pada masa penerbitan kedua, Mochtar Lubis ditahan lagi, hampir dua setengah bulan (Soebagijo, 1981; Atmakusumah, 1992:17; Haryanto, 2006; Suwirta, 2008; dan Hill, 2010).

Ketika Orde Baru memegang pemerintahan, *Indonesia Raya* bersama dengan surat-surat kabar lainnya, yang dibredel pada masa Orde Lama (1959-1966), bisa terbit kembali. Menteri Penerangan, Boediardjo, memberikan SIT (Surat Ijin Terbit) pada tanggal 24 Juli 1968, disusul dengan SIC (Surat Izin Cetak) dari Laksus KOPKAMTIB (Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 10 Agustus 1968 (Soebagijo, 1981; Abar, 1995; Haryanto, 2006; dan Hill, 2010).

Tiras surat kabar *Indonesia Raya* dimulai dengan 20,000 eksemplar setiap hari pada masa awal penerbitannya, kemudian meningkat menjadi 22,000 rata-rata sehari pada tahun 1969. Tahun berikutnya, tiras mengalami puncaknya, yakni antara 31,000 dan 43,000 setiap hari terbit (Surjomihardjo ed., 2002:271; dan Hill, 2010 dan 2011). Kenaikan tiras ini rupanya berhubungan dengan kritik-kritik yang dilancarkan oleh surat kabar *Indonesia Raya*, terutama pada masalah yang berhubungan dengan kobocoran uang negara di perusahaan minyak milik negara, yakni PERTAMINA atau Perusahaan Tambang Minyak Nasional (Ramadhan, 1990; Abdullah ed., 1997; Hill, 2010; dan Fauziah, 2017).

Dalam tahun-tahun berikutnya,

terjadi penurunan tiras yang drastik pada surat kabar *Indonesia Raya*, yakni menjadi rata-rata 26,000 eksemplar per hari pada tahun 1971; rata-rata 23,000 eksemplar per hari pada tahun 1972, dan rata-rata 20,000 eksemplar per hari pada bulan Januari-Mei 1973. Kemerossotan tiras yang mencolok itu, pada umumnya, diakibatkan oleh menurunnya mutu topografi, karena surat kabar *Indonesia Raya* dicetak dengan alat-alat yang sudah tua. Baru setelah perpindahan ke proses cetak *offset*, terjadi lagi peningkatan secara tetap dan mencapai tiras rata-rata 41,000 eksemplar per hari, ketika surat kabar ini ditutup pada bulan Januari 1974 (Surjomihardjo ed., 2002:272-273; dan Hill, 2010 dan 2011).

Pandangan dan Kritik Sosial Surat Kabar “Merdeka” dan “Indonesia Raya” terhadap

Peristiwa MALARI. Aksi protes serta kritik yang selama ini telah dilancarkan kepada pemerintah Orde Baru mendapatkan momentum yang tepat, ketika dilakukannya kunjungan kenegaraan PM (Perdana Menteri) Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia. Para mahasiswa menuntut diadakannya dialog dengan PM Jepang itu. Sementara itu, demonstrasi-demonstrasi menentang kedatangan Kakuei Tanaka terjadi di beberapa tempat, seperti di Jakarta dan Bandung, yang disertai dengan pembakaran boneka Kakuei Tanaka dan Soedjono Hoemardhani, salah seorang tokoh penting dalam ASPRI (Asisten Pribadi) Presiden Soeharto, yang menangani masalah-masalah keuangan dan ekonomi (Arifin, 1974; Rais, 1986; Siregar, 1998; Lasut, 2011; Jazimah, 2013; Lailah, Syah & Syaiful, 2015; Padiatra, 2015; dan Khairani, 2016).

Namun, demonstrasi-demonstrasi yang bersifat damai dan dilakukan oleh para mahasiswa itu kemudian berubah menjadi aksi huru-hara terbesar pada masa awal pemerintahan Orde Baru,

yang kemudian lebih dikenal dengan nama MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974 (cf Siregar, 1998; Lasut, 2011; Jazimah, 2013; Lailah, Syah & Syaiful, 2015; Padiatra, 2015; dan Khairani, 2016).

Menarik untuk dikaji di sini adalah bagaimana dua surat kabar, yaitu *Merdeka* dan *Indonesia Raya* di Jakarta, menyoroiti peristiwa MALARI tahun 1974. Sebelum terjadinya peristiwa MALARI tahun 1974, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa makin marak terjadi. Harian *Indonesia Raya* di Jakarta, misalnya, memandang bahwa aksi-aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para intelektual muda itu merupakan suatu aksi murni untuk menyalurkan “amanat penderitaan rakyat” (Abdullah ed., 1997; Sjamsuddin, 2002; dan Padiatra, 2015).

Demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia itu, rupanya, sedikit-banyak juga dipengaruhi oleh keberhasilan mahasiswa Thailand dalam menumbangkan rejim militer yang sedang berkuasa (Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015). Sorak-sorai yang dilakukan hanya dalam waktu beberapa hari saja telah mampu mengubah kepemimpinan di suatu negara. Hal ini semakin memantapkan niat mahasiswa Indonesia untuk terus melakukan perjuangannya melalui demonstrasi, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa di Thailand pada awal tahun 1970-an (Siregar, 1998; Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015).

Rencana kedatangan PM Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia semakin memanas situasi, bukan saja bagi mahasiswa tetapi juga bagi pers Indonesia. Baik surat kabar *Merdeka* maupun *Indonesia Raya* di Jakarta menurunkan berita mengenai kedatangan PM Jepang ini, terutama menyoroiti hubungan antara kedua negara. Pada tanggal 8 Januari 1974, misalnya, surat kabar *Indonesia Raya* menurunkan tajuk rencana

dengan judul “Indonesia Amat Lemah Menghadapi Jepang?”. Tulisan dalam tajuk rencana tersebut merupakan kutipan dari karangan seorang Guru Besar di KIU (*Kyoto Industrial University*) di Jepang, yang menyoroiti mengenai pernyataan dari Soedjono Hoemardhani, salah seorang ASPRI Presiden dalam bidang ekonomi, yang menyatakan bahwa Jepang memiliki kedudukan amat kuat terhadap Indonesia, sementara kedudukan Indonesia sangat lemah di hadapan Jepang.²

Berdasarkan tajuk rencana itu jelas sekali terlihat bahwa sikap dan pandangan surat kabar *Indonesia Raya* terhadap hubungan Indonesia – Jepang, serta peranan Soedjono Hoemardhani sebagai penghubung tidak resmi antara Indonesia – Jepang, sangatlah memprihatinkan. Surat kabar *Indonesia Raya* kemudian memandang bahwa hubungan Indonesia – Jepang harus terjalin atas dasar kesamaan derajat, bukan karena kedudukan Jepang lebih tinggi dari Indonesia (Abdullah ed., 1997).

Kritik yang cukup keras juga ditunjukkan kepada peranan Soedjono Hoemardhani – sebagai saluran penghubung tidak resmi antara Indonesia dengan Jepang – yang dianggap sangat merugikan, bahkan membahayakan posisi bangsa Indonesia. Untuk itu, dikemukakan dalam tulisan tajuk rencana surat kabar *Indonesia Raya* tersebut, betapa pentingnya mengembalikan semula hubungan Indonesia – Jepang ke dalam saluran-saluran resmi, yakni Departemen Dalam Negeri dan Luar Negeri, bukan oleh ASPRI Presiden (*ibidem* catatan kaki 2).

Baik surat kabar *Indonesia Raya* maupun *Merdeka* di Jakarta, sama-sama berpendapat bahwa kedatangan PM Jepang, Kakuei

²Lihat “Indonesia Amat Lemah Menghadapi Jepang?”, tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 8 Januari 1974.

Tanaka, ke Indonesia haruslah juga dibarengi dengan perubahan dalam pola hubungan antara Indonesia dengan Jepang. Surat kabar *Merdeka*, misalnya, menulis bahwa bila kunjungan Kakuei Tanaka ke Indonesia dan ke negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak diikuti dengan perubahan sikap dan orientasi, dalam artian tetap mempertahankan pola “binatang ekonomi” demi keuntungannya sendiri, maka ianya akan berakibat buruk bagi kepentingan Jepang. Dengan bahasa yang relatif sopan, surat kabar *Merdeka* di Jakarta memberikan pandangan, sebagai berikut:

[...] Suatu kerugian Jepang ialah bahwa jalan yang ditemuhnya untuk mengurus kekayaan anak negeri secara pelan-pelan selama ini, pelan-pelan juga diketahui oleh anak negeri. Dan jika kesadaran sudah sampai pada topnya, tinggallah lagi kerugian-kerugian materiil dan idiil. Bagi Jepang tentunya (*Merdeka*, 9/1/1974).

Sementara itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta, dalam tajuk rencananya, menurunkan judul “Selamat Datang, Tanaka-san”. Dalam tajuk rencana tersebut, surat kabar *Indonesia Raya* ingin menegaskan kembali bahwa hubungan Indonesia – Jepang harus diletakkan pada saluran-saluran yang resmi dan tidak dicampuradukkan dengan kepentingan *vested interest* Jakarta *lobby* dan Tokyo *lobby*, karena hubungan yang selama ini dijalin telah lebih menguntungkan pihak Jepang dan banyak merugikan pihak Indonesia. Dengan blak-blakan, surat kabar *Indonesia Raya*, kemudian, menulis sebagai berikut:

Sayang, Tanaka tidak dapat dibawa melihat ke Kalimantan (hutan-hutan yang rusak oleh penebangan kayu yang main hantam *kromo*), atau dibawa ke Ambon melihat cara orang Jepang menangkap udang dengan sewenag-wenang, atau ke pabrik-pabrik yang memakai mesin-mesin Jepang bekas pakai dan disulap jadi baru. Dan sayang, kita tidak dapat memperlihatkan padanya kelakuan-

kelakuan modal Jepang mengkorupsi orang di Indonesia.³

Kedua surat kabar di Jakarta tersebut, yakni *Merdeka* dan *Indonesia Raya*, bukan hanya memberikan “nasehat” kepada pihak Jepang, tetapi juga kepada pemerintah Indonesia, karena menurut kedua surat kabar itu, semua akhirnya akan bergantung pada sikap dan pendirian pemerintah Indonesia sendiri. Surat kabar *Merdeka* di Jakarta, misalnya, (10/1/1974) menulis berita lebih lanjut, sebagai berikut:

[...] Jepang akan terus bisa “main” selama dia mendapat bantuan dari kerabat-kerabatnya, yang kebetulan sedang berkuasa dan menentukan [...] lebih penting lagi ialah sikap pemimpin negeri, karena akhirnya merekalah yang menentukan! (*Merdeka*, 10/1/1974).

Sementara itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta juga mengemukakan pandangan, sebagai berikut:

[...] terutama pemimpin-pemimpin bangsa kita, harus belajar memperbesar kepercayaan diri kita sendiri dan mengembangkan kemampuan bangsa kita untuk lebih baik lagi dapat melindungi kepentingan-kepentingan bangsa kita terhadap siapa saja di dunia ini. Dan jangan mengharapkan Jepang akan berubah begitu saja (*Indonesia Raya*, 10/1/1974).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kedatangan PM (Perdana Menteri) Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia memang disambut demonstrasi oleh para mahasiswa. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara para demonstran dengan aparat keamanan. Menanggapi hal ini, Departemen HANKAM (Pertahanan dan Keamanan) dan KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban)

³Lihat “Selamat Datang, Tanaka-san”, tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 9 Januari 1974.

beserta pimpinan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) mengeluarkan keputusan mengenai larangan dilakukannya demonstrasi oleh mahasiswa (Arifin, 1974; Rais, 1986; Siregar, 1998; Lasut, 2011; Jazimah, 2013; Lailah, Syah & Syaiful, 2015; Padiatra, 2015; dan Khairani, 2016).

Gerakan-gerakan mahasiswa, terutama ketika dilakukannya kunjungan PM Jepang, Kakuei Tanaka, sudah dianggap tidak murni lagi, serta akan bersifat terjurumus dan meningkat menjadi rusuh, seperti yang terjadi di Muangthai. Demikian pandangan surat kabar *Merdeka* di Jakarta, dalam beritanya pada tanggal 15 Januari 1974. Dalam peristiwa itu, sedikitnya 8 orang mahasiswa ditahan, menyusul terjadinya insiden pemukulan terhadap mahasiswa, yang sedang melakukan aksinya (*Merdeka*, 15/1/1974).

Sementara itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta mengkritik tindakan Polisi, terutama ketika pihak berwajib menyatakan bahwa penahanan dilakukan bukan karena mahasiswa melakukan demonstrasi, tetapi telah melakukan tindak kekerasan. Surat kabar *Indonesia Raya* menganggap bahwa hal itu merupakan pernyataan yang “keburu nafsu” dan tidak berdasar sama sekali. Bahkan dengan jelas sekali, surat kabar *Indonesia Raya* menyatakan bahwa lebih baik Polisi berterusterang saja mengenai alasan penahanan para pemuda dan mahasiswa, yakni agar kedatangan PM Jepang, Kakuei Tanaka, tidak diganggu oleh demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa (*Indonesia Raya*, 15/1/1974).

Mengenai peristiwa pemukulan terhadap mahasiswa, dalam catatan pojoknya yang ditulis oleh “Mas Kluyur”, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 1974, menyatakan bahwa tindakan

itu bukanlah suatu hal yang pantas dilakukan. Catatan pojok tersebut, lebih lanjut, menyatakan sebagai berikut:

[...] lantas mas Kluyur ditanya oleh mbah Keliru. Kalau ada orang yang mengancam-ngancam akan menghajar orang, itu bahasa apa?

Oh, tentu itu istilah yang suka dipakai oleh tukang pukul!

Dan kalau tukang pukul, apa layak jadi pemimpin, tanya mbah Keliru lagi.

Jawabnya tentu terserah pada pembaca.⁴

Pernyataan “apa tukang pukul pantas jadi pemimpin” menunjukkan bahwa tindakan-tindakan pemukulan yang dilakukan kepada mahasiswa itu jelas bukanlah tindakan seorang pemimpin. Kritik terhadap tindakan seorang pemimpin yang main pukul, yang pada masa Orde Baru didominasi oleh tentara, jelas merupakan ketidaksenangan media massa – sebagai representasi dari aspirasi masyarakat – terhadap pemerintahan Presiden Soeharto dan aparat keamanannya (Lubis, 1993; Abdullah ed., 1997; dan Siegel, 2000).

Walaupun Departemen HANKAM (Pertahanan dan Keamanan) telah mengeluarkan larangan keras terhadap demonstrasi, namun ribuan pemuda/pelajar mengadakan demonstrasi di sekitar Istana Merdeka, yaitu tempat dilakukannya perundingan antara Presiden Soeharto dengan PM (Perdana Menteri) Jepang, Kakuei Tanaka. Namun para pendemo tidak dapat memasuki istana, karena dilakukan penjagaan yang ketat oleh pihak keamanan. Para pendemo kemudian membawa slogan-slogan yang, antara lain, berbunyi: “*Tolak Dominasi Modal Asing/Jepang*” (dalam Muhaimin, 1991; Agustina *et al.*, 2014; dan Khairani, 2016).

Sebelum itu, di halaman Fakultas Kedokteran UI (Universitas Indonesia) Salemba di Jakarta diadakan apel

⁴Lihat “Mas Kluyur”, catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 15 Januari 1974.

berkabung menyambut kedatangan Kakuei Tanaka. Untuk menghangatkan suasana, para mahasiswa menyanyikan lagu anak-anak dengan aransemen yang disesuaikan dengan kedongkolan hati para mahasiswa. Misalnya, lagu “Tek kotek kotek kotek” berkumandang dengan kocak dan sinisnya menjadi: “Tek kotek kotek kotek, Tanaka itu punya antek, anteknya adalah ABRI, yang suka makan komisi” (Siregar, 1998; dan Lasut, 2011).⁵

Setelah melakukan apel, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari UI (Universitas Indonesia), UKI (Universitas Kristen Indonesia), dan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di Jakarta itu meninggalkan Kampus UI Salemba untuk menggabungkan diri bersama-sama mahasiswa UNSAKTI (Universitas Trisakti) di Tanah Abang, Jakarta. Selama perjalanan, para mahasiswa berusaha untuk menurunkan setengah tiang bendera-bendera Jepang dan bendera Merah-Putih, namun hal itu dapat dicegah oleh satuan-satuan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Siregar, 1998; Agustina *et al.*, 2014; dan Padiatra, 2015).

Sementara para mahasiswa dan pelajar melakukan aksi demonstrasi, tiba-tiba di berbagai pelosok ibu kota Jakarta, dalam radius belasan kilometer, terjadi kerusuhan. Proyek pasar Senen, gedung Toyota Astra, serta *Coca Cola* diserbu dan dibakar oleh massa. Begitu pula dengan President Hotel milik Jepang, tempat wartawan Jepang menginap pun, menjadi sasaran penyerbuan. Belum lagi terjadi pembakaran dan pengrusakan oleh orang-orang tak

dikenal terhadap mobi-mobil merk Jepang. Kerusuhan itu baru mereda sekitar pukul 20.00 malam (Yogaswara, 2009; Agustina *et al.*, 2014; dan Padiatra, 2015).

Terjadinya kerusuhan massa pada tanggal 15 Januari 1974 itu menjadi perhatian tersendiri bagi surat kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya* di Jakarta. Pada tanggal 16 Januari 1974, misalnya, halaman depan surat kabar *Merdeka* menampilkan foto-foto kerusuhan yang terjadi pada hari sebelumnya, dengan judul “Jakarta Meledak”. Begitu pula dengan surat kabar *Indonesia Raya*, yang memuat foto-foto dari mulai demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan pengrusakan mobil-mobil Jepang (*Indonesia Raya*, 16/1/1974; dan *Merdeka*, 16/1/1974).

Menanggapi peristiwa tersebut, baik surat kabar *Merdeka* maupun surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta berpendapat bahwa gerakan-gerakan mahasiswa yang berubah menjadi kerusuhan massa karena telah ditanggapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (*Indonesia Raya*, 16/1/1974; dan *Merdeka*, 16/1/1974). Dalam catatan pojoknya, yang ditulis oleh Dr. Clenik, surat kabar *Merdeka* menyatakan, sebagai berikut:

[...] Jelas dong pak, bagaimana mau murni, yang bergerak justru pencoleng, tukang curi, tukang bikin onar, dll. Masak mahasiswa kita mau disamakan dengan pencoleng.⁶

Surat kabar *Merdeka* di Jakarta berpendapat bahwa yang telah melakukan pengrusakan dan kerusuhan massa, pada tanggal 15 Januari 1974, bukanlah mahasiswa tetapi oleh orang-orang yang sengaja mengambil kesempatan ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi (*Merdeka*, 16/1/1974).

Begitu pun dengan sikap dan

⁵Aksi demonstrasi mahasiswa Indonesia, yang disertai nyanyian populer, kocak, dan sarkastis, menjadi ciri khas gerakan mahasiswa pada tahun 1966. Juga menjadi ciri khas gerakan mahasiswa Indonesia ketika pada tahun 1998 nanti, yang pada akhirnya bisa menumbangkan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Lihat, misalnya, Soe Hok Gie (1983); dan Andi Suwirta (1998a dan 1998b).

⁶Lihat “Catatan Pojok Dr. Clenik” dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 16 Januari 1974.

pandangan surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta. Dalam tajuknya yang berjudul “Harus Diselesaikan dengan Bijaksana”, surat kabar ini mengemukakan bahwa kerusuhan yang terjadi itu seolah-olah ingin merusak *image* yang ada di dalam masyarakat terhadap aksi-aksi murni yang dilakukan oleh para mahasiswa.⁷

Lebih lanjut, baik surat kabar *Indonesia Raya* maupun surat kabar *Merdeka* di Jakarta meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut secara bijaksana, dengan kepala yang dingin, dan dilandaskan pada kesadaran bahwa mahasiswa yang melakukan demonstrasi itu pada dasarnya adalah anak-anak negeri, yang hanya ingin mengingatkan golongan tua (pemerintah) agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan bangsa dan negara (*Indonesia Raya*, 16/1/1974; dan *Merdeka*, 16/1/1974).

Sementara itu, surat kabar *Merdeka* di Jakarta menanggapi kerusuhan berupa pembakaran dan pengrusakan barang-barang yang bebau Jepang sebagai protes terhadap hidup masyarakat yang semakin melarat, sehingga apa saja yang dianggap dan dicap mewah menjadi sasaran kemarahan. Pembakaran mobil-mobil Jepang diindikasikan sebagai penolakan masyarakat umum terhadap masuknya mobil-mobil Jepang ke Indonesia (Chaniago *et al.*, 1986; Abar, 1995; Siregar, 1998; dan Agustina *et al.*, 2014).

Di samping itu, pengrusakan klub-klub malam lebih diakibatkan karena tempat tersebut merupakan wahana untuk menghambur-hamburkan uang oleh sebagian orang-orang pribumi dan non-pribumi yang hidup mewah. Sedangkan perusakan Pasar Senen, yang membumbung tinggi, disebabkan

karena ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada golongan pribumi, mengingat tempat tersebut lebih banyak dihuni oleh golongan non-pribumi (Siregar, 1998; Agustina *et al.*, 2014; dan Padiatra, 2015).

Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk dari gejolak sosial-ekonomi yang tidak akan berhenti. Di satu sisi, surat kabar *Merdeka* memandang bahwa kerusuhan itu menunjukkan kegagalan mahasiswa dalam melakukan koreksinya terhadap pemerintah, karena mahasiswa tidak memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Namun disisi lain, surat kabar *Merdeka* juga memandang hal itu sebagai kegagalan pemerintah untuk merealisasikan suatu konsep kepada suatu pelaksanaan yang nyata. Dalam tajuknya lebih lanjut, surat kabar *Merdeka* di Jakarta menulis, sebagai berikut:

[...] untuk pemerintah, bagaimana mendekatkan konsepsi pemerintah dengan pelaksanaannya kepada kepentingan massa banyak, dengan pelaksanaannya secara sungguh-sungguh. Hal ini masih terus diabaikan! (*Merdeka*, 16/1/1974).

Sementara itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta mensinyalir ada suatu hal yang tidak beres berkaitan dengan pembakaran mobil-mobil ber-merk Jepang. Dalam catatan pojoknya, surat kabar ini mengemukakan, sebagai berikut:

Berbicara tentang pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah, toko-toko, atau mobil-mobil, Mas Kluyur tak habis heran, darimana pemuda-pemuda liar ini mendapatkan mobil-mobil truk yang hilir-mudik di jalan di daerah Cempaka Putih, Tanah Abang, Pancol, dll, sehingga dengan gampang dapat melakukan gerak cepat membakar dan merusak mobil-mobil yang mereka incer?

Pihak berwajib seharusnya mencari juga di kalangan pemilik-pemilik mobil, dalang dari tindakan-tindakan destruktif ini.⁸

⁷Lihat “Harus Diselesaikan dengan Bijaksana”, tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 16 Januari 1974.

⁸Lihat “Mas Kluyur”, catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 16 Januari 1974.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta mempertanyakan bagaimana mungkin para pemuda dapat dengan mudah membakar mobil-mobil bermerk Jepang, seandainya tidak ada rekayasa di balik peristiwa itu. Kalimat “*pemilik-pemilik mobil, dalang dari tindakan destruktif ini*” menunjukkan bahwa mobil-mobil tersebut sudah dengan sengaja ditempatkan untuk dijadikan sasaran kerusuhan (Abdullah ed., 1997; Siregar, 1998; Agustina et al., 2014; dan Padiatra, 2015).

Selain itu, surat kabar *Indonesia Raya* juga mempertanyakan pengamanan oleh pihak yang berwenang terhadap berlangsungnya demonstrasi mahasiswa. Perusakan dan pembakaran terjadi, karena pengamanan hanya difokuskan di sekitar Istana Merdeka dan Istana Negara; sementara di daerah-daerah lain kurang, sehingga menyebabkan praktek-praktek pembakaran bisa terjadi dengan leluasa tanpa tercegah oleh alat negara (Abdullah ed., 1997; Siregar, 1998; Agustina et al., 2014; dan Padiatra, 2015).

Tidak dapat disangkal bahwa kedatangan Kakuei Tanaka ke Indonesia telah memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran, yang akhirnya berujung pada huru-hara dan menyebabkan 11 orang tewas, ratusan orang ditangkap, serta kerugian materil yang sangat besar. Surat kabar *Merdeka* di Jakarta mengomentari hal itu melalui catatan pojoknya yang berjudul “Terlalu”. Catatan pojok tersebut, antara lain, menyatakan sebagai berikut:

[...] orang-orang Indonesia ini memang terlalu, senyum dan bunguknya Tanaka dikata senyum dan bunguk ... maut.⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi orang Indonesia, kedatangan Kakuei Tanaka ke Indonesia hanya membawa kerugian

⁹Lihat “Catatan Pojok Dr. Clenik: Terlalu” dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 17 Januari 1974.

belaka (*Merdeka*, 17/1/1974). Begitu juga dengan surat kabar *Indonesia Raya*, yang nampaknya sependapat dengan surat kabar *Merdeka*. Namun tidak seperti *Merdeka*, yang mengemukakan pandangan dalam catatan pojoknya yang relatif singkat, surat kabar *Indonesia Raya* menyatakan pandangan dalam tajuk rencananya dengan judul “Pengalaman dengan Jepang Selalu Pahit”. Dalam tajuk rencana yang ditulis oleh Muchtar Lubis itu ingin ditegaskan bahwa dalam sejarahnya, hubungan antara Indonesia dengan Jepang selalu diwarnai dengan kepahitan-kepahitan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bahkan Muchtar Lubis menyatakan bahwa pengalaman rakyat Indonesia di bawah penjajahan Jepang sama menderitanya ketika rakyat-rakyat Eropa berada di bawah kaki NAZI (*National Sozialismus*) Jerman. Kemudian dinyatakan bahwa:

[...] setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang pun dengan segala kecongkakan kekuatan ekonominya terus mencoba memeras kekayaan Indonesia, dibantu oleh berbagai orang yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka dan membuka pintu bagi mengalirnya kekuatan ekonomi Jepang dengan deras ke tanah air kita.¹⁰

Selain menyoroti mengenai kecongkakan Jepang, lagi-lagi surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta menyoroti bahwa kegiatan Jepang itu tidak akan bermakna tanpa bantuan “orang-orang dalam”. Dalam catatan pojoknya, surat kabar *Indonesia Raya* menyinggung, sebagai berikut:

Mbah Keliru kirim pesan pada pembaca untuk meneliti baik-baik potret tengah yang kemarin disiarkan oleh *IR* di halaman depan. Kalau itulah lambang konfrontasi antara mahasiswa dengan alat negara kita, gara-gara Jepang, kata mbah Keliru, kan lebih baik tak ada Jepang.¹¹

¹⁰Muchtar Lubis, “Pengalaman dengan Jepang Selalu Pahit”, tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 17 Januari 1974.

¹¹Lihat “Mas Kluyur”, catatan pojok dalam surat

Dalam catatan pojok surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta tersebut, Mbah Keliru (nama samaran untuk Muchtar Lubis) ingin para pembacanya “meneliti baik-baik potret tengah”, yaitu potret-potret yang memperlihatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan, dan bahwa konfrontasi antara mahasiswa di satu pihak dengan alat negara (pemerintah) di pihak yang lain disebabkan oleh kedatangan Jepang ke Indonesia, atau lebih tepatnya praktek-praktek ekonomi Jepang yang telah banyak merugikan Indonesia (Abdullah ed., 1997; Siregar, 1998; dan Khairani, 2016).

Tindakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah MALARI. Sebagai tindak lanjut dari kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974, pemerintah Orde Baru kemudian mengumumkan jam malam, terhitung mulai tanggal 15 Januari 1974 dari jam 18.00 malam sampai dengan jam 06.00 pagi. Universitas-universitas dan sekolah-sekolah ditutup, dan terhitung mulai tanggal 16 Januari 1974, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan berkumpul di luar rumah lebih dari 5 orang, sejak matahari terbit hingga matahari terbenam (Arifin, 1974; Siregar, 1998; Lasut, 2011; Jazimah, 2013; Lailah, Syah & Syaiful, 2015; Padiatra, 2015; dan Khairani, 2016).

Menanggapi kebijakan itu, surat kabar *Merdeka* di Jakarta menanggapi secara jenaka. Dalam catatan pojoknya, yang ditulis oleh Dr. Clenik, surat kabar *Merdeka* menyatakan, sebagai berikut:

Banyak orang-orang iseng yang tidak senang dengan jam malam, sebab tidak bisa keluyuran. Tapi ibu-ibu senang sekali, sebab bapak-bapak terpaksa tinggal di rumah. Latihan untuk masa datang tanpa *night club*.¹²

Begitupun dengan surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta, yang dalam

kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 17 Januari 1974.

¹²Lihat “Catatan Pojok Dr. Clenik” dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 18 Januari 1974.

catatan pojoknya menulis, sebagai berikut:

Di Jakarta semenjak tanggal 15 Januari yang lalu telah berlaku jam malam, dari jam 18.00 – 06.00 pagi.

*Mas Kluyur mengharapkan saja agar program “Keluarga Berencana” tidak akan menjadi rusak dengan peraturan ini. Maklumlah, sang bapak tidak bisa keluyuran di malam hari sih!*¹³

Setelah kerusuhan terjadi, pemerintah Orde Baru, melalui Laksus (Pelaksana Khusus) KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), kemudian, melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 (Siregar, 1998; Lasut, 2011; Jazimah, 2013; Lailah, Syah & Syaiful, 2015; dan Padiatra, 2015). Dalam konteks ini, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta melaporkan bahwa sekitar 200 orang, yang dianggap terlibat dalam kerusuhan, ditangkap. Beberapa cendekiawan pun, seperti Prof. Sarbini Sumawinata, Dorojatun Kuncorojakti, Marsilam Simanjuntak, dan Subadio Sastrosatomo, turut ditangkap. Tak ketinggalan para pemimpin mahasiswa, seperti Hariman Siregar, Gurmilang Kartasmita, dan Bambang Sulistomo; bahkan pejuang HAM (Hak Asasi Manusia), H.J. Princen, pun ditangkap; serta banyak lagi tokoh cendekiawan yang menjadi sasaran penangkapan pemerintah Orde Baru (*Indonesia Raya*, 19/1/1974; Abdullah ed., 1997; Siregar, 1998; Yogaswara, 2009; dan Padiatra, 2015).

Adalah menarik untuk dicatat bahwa surat kabar *Merdeka* di Jakarta, justru menyetujui tindakan-tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru tersebut. Surat kabar *Merdeka*, misalnya, berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru memang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya

¹³Lihat “Mas Kluyur”, catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 18 Januari 1974.

peristiwa yang sama. “[...] tentunya ini untuk segera mencegahnya tindak kejahatan yang akan datang, sebagai lanjutan dari yang lalu”, kata surat kabar *Merdeka* (19/1/1974).

Dengan meredanya keadaan, akibat peristiwa 15 Januari 1974, pemerintah Orde Baru segera mengadakan sidang kabinet, dengan hasil keputusan untuk mengambil langkah-langkah dalam menertibkan pelaksanaan hak-hak demokrasi, antara lain tidak membenarkan demonstrasi-demonstrasi, penertiban dalam pers atau surat kabar, serta menertibkan kehidupan di universitas-universitas agar tidak digunakan oleh kegiatan-kegiatan politik (Malarangeng, 1992; Jaya, 1997; Siregar, 1998; dan Padiatra, 2015).

Melihat perkembangan seperti itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta menanggapi dengan perasaan pesimis dan kecewa. Dalam catatan pojoknya, pada tanggal 21 Januari 1974, surat kabar *Indonesia Raya* mengkritik dengan keras, tanpa ada rasa humor sedikit pun, sebagai berikut:

Melihat perkembangan-perkembangan terakhir ini, ada pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat yang sering disorot oleh para mahasiswa, kini merasa lega. [...] para cukong yang sudah mulai gelisah, kini kabarnya sudah siap pula dengan proyek-proyek baru, yang akan disandarkan kepada instansi-instansi pemerintah yang kompeten.¹⁴

Dari tulisan-tulisan dalam surat kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya* di Jakarta itu menjadi jelas bahwa dengan dilarangnya demonstrasi-demonstrasi, “penertiban pemberitaan pers”, juga dilarangnya kampus-kampus untuk melakukan kegiatan politik, termasuk juga didalamnya penangkapan terhadap para mahasiswa dan beberapa cendekiawan yang terkenal kritis, berarti juga kritik sosial yang selama ini gencar dilakukan terhadap praktek-praktek yang menyimpang dari

¹⁴Lihat “Mas Kluyur”, catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 21 Januari 1974.

pemerintah Orde Baru, akan berakhir, sehingga para pejabat, pengusaha, dan koruptor lainnya akan bebas melakukan aksi-aksi mereka tanpa harus resah dan gelisah, karena tingkah-laku mereka selalu menjadi sorotan mahasiswa dan pers (Abar, 1995; Siregar, 1998; Hill, 2011; dan Padiatra, 2015).

Namun, berbeda dengan surat kabar *Indonesia Raya*, dalam menanggapi penahanan kepada para mahasiswa dan tokoh intelektual yang terlibat dalam aksi peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974, surat kabar *Merdeka* memiliki sikap yang sama dengan pemerintah. Hal itu nampak, seperti ditunjukkan dalam catatan pojoknya, yang berjudul “Demokrasi”. Dikatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah penertiban dalam melaksanakan hak-hak demokrasi, dalam hubungan dengan kericuhan baru-baru ini. Catatan pojok dalam surat kabar *Merdeka* itu, lebih lanjut, menyatakan sebagai berikut:

Dr. Clenik setuju sekali, karena dalam demokrasi yang sejati, marah-marah juga bisa tertib. Apalagi dalam demokrasi Pancasila kan?¹⁵

Dalam hal ini, B.M. (Burhanuddin Muhammad) Diah, sebagai Pemimpin Redaksi surat kabar *Merdeka* di Jakarta, justru turut menyetujui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Orde Baru, terutama dalam hal pelarangan demonstrasi dan penahanan tokoh-tokoh politik yang dinilai ada sangkut-pautnya dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Kedua partai politik tersebut tidak hanya sudah dibubarkan oleh pemerintah Orde Lama (1959-1966), tetapi juga dianggap menunggangi aksi mahasiswa dalam peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974. Bagaimanapun,

¹⁵Lihat “Catatan Pojok Dr. Clenik” dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 19 Januari 1974.

B.M. Diah adalah seorang nasionalis, yang mengharapkan dukungan dari pemerintah Orde Baru untuk memimpin PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dari saingan beratnya, Rosihan Anwar, yang dinilai condong kepada ideologi PSI (Soebagijo, 1981; Anwar, 1983; Chaniago *et al.*, 1986; Said, 1988; Kakailatu, 1997; Yogaswara, 2009; dan Suwirta, 2017).

Menyusul adanya pemberitaan-pemberitaan pers yang dianggap provokatif dan dinilai dapat mengganggu ketertiban dan keamanan negara, maka pemerintah Orde Baru, pada tanggal 19 Januari 1974, mencabut SIT (Surat Ijin Terbit) surat kabar *Nusantara* di Jakarta; menyusul kemudian mingguan *Mahasiswa Indonesia* di Bandung, yang juga dicabut surat ijin terbitnya (Raillon, 1985; Aly, 2004; dan Hill, 2011). Tidak ketinggalan pula, pada tanggal 21 Januari 1974, beberapa surat kabar, seperti: *Harian KAMI*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, mingguan *Wenang*, majalah *Pemuda Indonesia*, dan tentu saja tidak ketinggalan surat kabar *Indonesia Raya*, menjadi sasaran pencabutan SIT oleh pemerintah Orde Baru. Setelah itu, menyusul surat kabar *Pedoman* dan mingguan *Ekspres* dicabut ijin cetaknya oleh pemerintah Orde Baru pada tanggal 23 Januari 1974 (Anwar, 1983; Raillon, 1985; Said, 1988; Haryanto, 2006; dan Hill, 2010 dan 2011).

Adalah menarik bahwa surat kabar *Merdeka* di Jakarta, pada akhirnya, luput dari usaha pembredelan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tanggal 22 Januari 1974, surat kabar *Merdeka*, pada halaman utamanya, menurunkan berita hasil wawancara antara wartawan *Merdeka* dengan Ali Moertopo, yang di dalamnya menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 itu merupakan usaha untuk mengubah UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan menggulingkan pimpinan nasional, yang didalangi oleh oknum-oknum eks PSI dan MASYUMI

(*Merdeka*, 22/1/1974).

Dalam hal ini, surat kabar *Merdeka* di Jakarta memiliki pendapat yang sama dengan Ali Moertopo, salah seorang tokoh ASPRI (Asisten Pribadi) Presiden Soeharto yang menangani masalah sosial-politik. Dalam tajuk rencananya yang berjudul “Sejarah Berulang”, surat kabar *Merdeka* juga menyatakan bahwa keterangan Ali Moertopo tentang kehadiran oknum-oknum dari partai terlarang PSI dan MASYUMI, sebagai dalang dari demonstrasi para mahasiswa yang telah menimbulkan kerugian bagi rakyat dan masyarakat, merupakan suatu perkembangan logis, yang menurut perkiraan surat kabar *Merdeka*, pada suatu hari, sekalipun tidak ada demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, tindak kerusuhan tersebut akan terjadi juga. Kemudian, dalam tajuk rencana tersebut, surat kabar *Merdeka* mengemukakan sejarah perjalanan PSI, yang dianggap tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia, sebagai berikut:

[...] Memang tercatat kegiatan bekas PSI itu, yang menuju kepada kegiatan destruktif atau penghancuran cita-cita rakyat yang terkandung dalam UUD 45 dan Pancasila. Hal ini dikerjakan selalu dengan berkomplot dengan pihak-pihak asing, yang tentunya sejalan dengan pendiriannya sebagai partai.¹⁶

Menurut pandangan surat kabar *Merdeka* di Jakarta, PSI (Partai Sosialis Indonesia) melakukan kegiatan-kegiatannya, termasuk yang berhubungan dengan kerusuhan MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974, tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan atas kolaborasi partai tersebut dengan pihak-pihak asing, yang memang sengaja ingin melakukan kekacauan di Indonesia (*Merdeka*, 22/1/1974). Surat kabar *Merdeka*, yang dipimpin oleh B.M. (Burhanuddin Muhammad) Diah, memang termasuk

¹⁶Lihat “Sejarah Berulang”, tajuk rencana dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 22 Januari 1974.

pers yang nasionalis; hal ini berbeda dengan surat kabar *Pedoman*, yang dipimpin oleh Rosihan Anwar, misalnya, yang condong kepada ideologi Sosialis dan PSI (Soebagijo, 1981; Anwar, 1983; Chaniago *et al.*, 1986; Said, 1988; Abar, 1995; Kakiailatu, 1997; dan Hill, 2011).

Sementara itu dalam menyoroti peranan MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), surat kabar *Merdeka* di Jakarta menyatakan bahwa partai tersebut masih beruntung, karena oknum-oknum partai dapat membonceng perjuangan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan mahasiswa pada masa awal Orde Baru, dan lebih banyak dapat angin, sehingga bisa duduk dalam kekuasaan-kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan Presiden Soeharto (*Merdeka*, 22/1/1974). Dalam catatan pojoknya, pada tanggal 22 Januari 1974, surat kabar *Merdeka* menyatakan kembali kritik sosialnya kepada PSI dan MASYUMI, tanpa ada rasa humor sama sekali, sebagai berikut:

[...] dalang kerusuhan 15 Januari 1974 adalah oknum-oknum eks PSI dan MASYUMI. Dalam hal ini, rakyat tidak bisa tutup mata.¹⁷

Babak akhir dalam drama politik di Indonesia adalah pergantian beberapa pucuk pimpinan di kalangan militer, yang menjadi episode akhir dalam peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974. Dalam konteks ini, menurut Harold Crouch (1999) dan pengkaji lainnya, bahwa konflik internal antara perwira tinggi TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat) menunjukkan keutuhan di atas dasar-dasar yang rapuh (Malarangeng, 1992; Crouch, 1999; dan Jenkins, 2010). Walaupun pemerintah Orde Baru berusaha untuk melemparkan kesalahan atas terjadinya peristiwa

¹⁷Lihat “Catatan Pojok Dr. Clenik” dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 22 Januari 1974.

MALARI tahun 1974 itu kepada sisa-sisa PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), namun jelas bahwa tantangan utama datang dari tubuh TNI-AD sendiri (Rajab, 2004; Yogaswara, 2009; dan Jenkins, 2010).

Pada tanggal 28 Januari 1974, Presiden Soeharto mengambil alih kepemimpinan KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), sehingga Jenderal Soemitro dipaksa untuk berhenti dari jabatannya sebagai Panglima KOPKAMTIB; serta meniadakan lembaga ASPRI (Asisten Pribadi) Presiden, yang beranggotakan tokoh-tokoh yang disorot dan dikritik oleh para mahasiswa, seperti Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani (Soeharto, 1989; Malarangeng, 1992; Siregar, 1998; Lasut, 2011; dan Padiatra, 2015). Rivalitas diantara Jenderal-jenderal TNI-AD pada masa awal Orde Baru – khususnya pasca peristiwa MALARI tahun 1974 – dapat diatasi oleh Presiden Soeharto, tanpa mengganggu posisi dirinya sebagai pemimpin nomor satu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jaya, 1997; Jazimah, 2013; Lailah, Syah & Syaiful, 2015; dan Padiatra, 2015).

Presiden Soeharto menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk lebih mengefektifkan tindakan penertiban, mengatasi masalah-masalah keamanan, serta mempertanggung-jawabkannya sesuai dengan wewenang yang berdasarkan pada konstitusi. Sementara itu, peniadaan ASPRI Presiden dilakukan karena Presiden Soeharto memandang bahwa keadaan sekarang tidak lagi membutuhkan ASPRI. Tidak hanya mengambil-alih kepemimpinan PANGKOPKAMTIB, Presiden Soeharto juga mengganti Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Nasional) dari Sutopo Juwono, orang kepercayaan Jenderal Soemitro, kepada Yoga Sugomo, orang kepercayaan Presiden Soeharto (Soeharto, 1989; Wiwoho &

Chaeruddin, 1995; dan Padiatra, 2015).

Menanggapi pergantian tersebut, surat kabar *Merdeka* di Jakarta, dalam catatan pojoknya, mengucapkan selamat kepada pemimpin-pemimpin baru dan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang lama.¹⁸ Tampak bahwa surat kabar *Merdeka* tidak begitu mempermasalahkan mengenai pergantian-pergantian yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru tersebut. Ini yang menjadi salah satu alasan, surat kabar *Merdeka* tidak dibredel oleh pemerintah Orde Baru pada masa pasca peristiwa MALARI tahun 1974, karena *news & views* (berita dan pandangan) yang dimilikinya dinilai sejalan dan mendukung tindakan-tindakan dan kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Berbeda dengan surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta, karena bersuara keras dan mengkritik tanpa tedeng aling-alang kepada pemerintah Orde Baru, ianya dibredel dan mati untuk selama-lamanya (Chaniago *et al.*, 1986; Abar, 1995; Abdullah *ed.*, 1997; Kakiailatu, 1997; Hill, 2010 dan 2011; dan Suwirta, 2015).

KESIMPULAN ¹⁹

Peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) tahun 1974, dimana para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang berujung dengan kerusuhan massal, merupakan

¹⁸Lihat "Catatan Pojok Dr. Clenik" dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 29 Januari 1974.

¹⁹**Sebuah Pengakuan:** Artikel ini, sebelum diterbitkan dan diubah-suai dalam bentuknya sekarang, merupakan ringkasan untuk bahan perkuliahan Sejarah Orde Baru dan Reformasi (1966-1998) di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Farida Sarimaya, M.Si. (*Allahyarhamah*) dan Moch Eryk Kamsori, S.Pd., dua orang Asisten Dosen saya, yang sudah banyak membantu proses perkuliahan dengan baik dan lancar. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para Mahasiswa yang mengontrak matakuliah tersebut, dimana banyak pertanyaan dan komentar mereka untuk memperbaiki dan mempertajam analisis dalam artikel ini. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam tulisan ini berada dibawah tanggung jawab akademik saya secara pribadi, dan tidak ada hubungan-kaitnya dengan mereka.

kejadian kontroversial pada masa awal kepemimpinan Presiden Soeharto dengan pemerintahan Orde Barunya (1966-1998). Peristiwa tersebut merupakan titik puncak dari ketidakpuasan berbagi kalangan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru. Rivalitas yang terjadi antara Jendral Soemitro, yang didukung oleh para perwira lapangan, dengan Mayor Jendral Ali Moertopo dan anggota ASPRI (Asisten Pribadi) Presiden lainnya, merupakan refleksi dari ketidakpuasan kalangan militer yang berasal dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat dan Divisi Brawijaya di Jawa Timur terhadap perwira-perwira dari Divisi Diponegoro di Jawa Tengah yang lebih dianakemaskan oleh Presiden Soeharto.

Ketidakpuasan kalangan partai politik, yang telah di *obok-obok* oleh OPSUS (Operasi Khusus) pimpinan Mayor Jenderal Ali Moertopo; ketidakpuasan kalangan kelas menengah Muslim Indonesia yang terpinggirkan oleh kalangan pengusaha non-Muslim; sampai pada ketidakpuasan para mahasiswa yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru dalam masalah sosial, ekonomi, dan politik tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak, merupakan permasalahan-permasalahan yang bertumpuk menjadi satu dan memuncak ketika datangnya PM (Perdana Menteri) Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia. Demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa itu kemudian berujung pada kerusuhan terbesar pada masa awal pemerintahan Orde Baru.

Kehidupan pers, khususnya surat kabar, pada masa awal pemerintahan Orde Baru, sampai terjadinya peristiwa MALARI tahun 1974, merupakan masa-masa yang paling baik dan kondusif. Pers memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangan, sikap, dan pendiriannya melalui

tajuk rencana dan catatan pojok terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Pemerintah sendiri bersikap longgar dan bertoleransi terhadap pemberitaan-pemberitaan pers, sekalipun itu merupakan kritik-kritik yang tajam.

Dalam hal ini, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta merupakan media massa yang terkenal kritis, terus-menerus melakukan salah satu fungsinya sebagai penyampai kritik sosial terhadap pemerintahan Orde Baru. Surat kabar *Indonesia Raya* selalu meyoroti ketimpangan dalam masalah modal asing, terutama modal yang berasal dari Jepang, dan mendapatkan momentum yang tepat ketika dilakukan kunjungan kenegaraan oleh PM Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia. Dalam tajuk rencana dan catatan pojoknya, surat kabar *Indonesia Raya* dengan keras menyoroti mengenai kelakuan-kelakuan para pengusaha Jepang di Indonesia serta mengkritik tindakan-tindakan tidak resmi yang dilakukan oleh Soedjono Hoemardhani, salah seorang anggota ASPRI (Asisten Pribadi) Presiden Soeharto, yang dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia.

Senada dengan surat kabar *Indonesia Raya*, namun dengan bahasa yang lebih halus, surat kabar *Merdeka* di Jakarta juga menyoroti mengenai hubungan Indonesia-Jepang yang dirasakan lebih menguntungkan pihak Jepang. Mengenai terjadinya peristiwa MALARI tahun 1974, baik surat kabar *Merdeka* maupun *Indonesia Raya* memiliki pendapat yang sama bahwa peristiwa itu terjadi karena gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa telah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Surat kabar *Merdeka*, misalnya, memandang peristiwa MALARI tahun 1974 dari dua sisi. *Pertama*, peristiwa itu mengindikasikan kegagalan mahasiswa dalam melakukan aksinya terhadap pemerintah. *Kedua*,

peristiwa itu juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengimplementasikan suatu konsep demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam peristiwa MALARI tahun 1974. Surat kabar *Indonesia Raya* mempertanyakan dari mana pemuda-pemuda itu bisa dengan mudah mendapatkan mobil-mobil ber-merk Jepang untuk dibakar. Surat kabar *Indonesia Raya* juga mempertanyakan pengamanan yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, sangat terlihat keberpihakan surat kabar *Indonesia Raya* terhadap perjuangan yang dilakukan oleh para mahasiswa, bila dibandingkan dengan surat kabar *Merdeka* di Jakarta.

Kedua surat kabar di Jakarta tersebut memiliki pendapat yang sama mengenai “peranan” Jepang, sehingga menimbulkan kerusuhan massa. Namun dalam menanggapi kebijaksanaan pemerintah untuk menyelesaikan masalah MALARI tahun 1974, terjadi perbedaan sikap dan pandangan di antara kedua surat kabar ibukota ini. Surat kabar *Merdeka*, misalnya, sangat menyetujui keputusan pemerintah Orde Baru untuk melarang dilakukannya demonstrasi serta penangkapan-penangkapan terhadap beberapa tokoh yang dianggap terlibat dalam peristiwa MALARI tahun 1974. Sementara surat kabar *Indonesia Raya* menolak, bahkan mengkritik, keputusan pemerintah Orde Baru yang dianggap oleh surat kabar tersebut sebagai keberpihakan pemerintah terhadap para petinggi negara dan *cukong-cukong* atau para pengusaha non-pribumi, yang selama ini menjadi sorotan para mahasiswa, para cendekiawan, dan kalangan pers di Indonesia.

Sikap surat kabar *Merdeka* yang mendukung pemerintah juga terlihat ketika Mayor Jenderal Ali Moertopo,

sebagai pimpinan OPSUS (Operasi Khusus) dan anggota ASPRI Presiden, menyatakan bahwa dalang dan arsitektur di balik peristiwa MALARI tahun 1974 adalah oknum-oknum eks PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan MASYUMI (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang telah dibubarkan oleh pemerintah Orde Lama (1959-1966). Melalui tajuk rencana dan catatan pojoknya, surat kabar *Merdeka* di Jakarta mendukung pernyataan dan tindakan pemerintah Orde Baru tersebut. Sementara itu, surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta, karena selalu bersikap kritis kepada pemerintah Orde Baru, maka mengalami pembredelan akibat dari adanya peristiwa MALARI tahun 1974 dan kemudian mati, alias tidak terbit lagi, untuk selama-lamanya.

Bagian akhir dari peristiwa MALARI tahun 1974 adalah ditandai dengan pencopotan kedudukan beberapa petinggi militer TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat), seperti digantinya Ketua BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Nasional), Panglima KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), dan penghapusan lembaga ASPRI Presiden. Dalam hal ini, surat kabar *Merdeka* di Jakarta, sekali lagi, tidak menunjukkan sikap yang menentang kebijakan pemerintah Orde Baru.

Peristiwa MALARI tahun 1974 memang menjadi suatu titik penting bagi kehidupan pers di Indonesia. Pemerintah Orde Baru menggunakan peristiwa tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membungkam suara dari pers yang selama ini sangat kritis. Setidaknya tiga radio swasta serta sepuluh surat kabar dan majalah dibredel, termasuk di dalamnya surat kabar *Indonesia Raya* di Jakarta. Manakala beberapa surat kabar yang dianggap tidak begitu keras dalam mengkritik pemerintah Orde Baru, termasuk di dalamnya surat kabar

Merdeka di Jakarta, dibiarkan untuk tetap terbit.²⁰

Referensi

- Abar, Akhmad Zaini. (1995). *Kisah Pers Indonesia, 1966-1974*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Abdullah, Taufik [ed]. (1997). *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya: Politik Dalam Negeri dan Masalah Nasional, Seri I*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Abdullah, Taufik & A.B. Lapian [eds]. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid 8: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Agustina, W. et al. (2014). *Massa Misterius MALARI: Rusuh Pertama dalam Sejarah Orde Baru*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Alfian. (1992). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Alidar, E.M.K. (2012). "Hukum Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1997)" dalam *Jurnal LEGITIMASI*, Vol.1, No.2 [Januari-Juni]. Tersedia juga dalam online di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/1429-2764-1-PB.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- Aly, Rum. (2004). *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia, 1970-1974*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Anwar, Rosihan. (1983). *Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Arifin, Marzuki. (1974). *Fakta Analisa Lengkap dan Latar Belakang Peristiwa 15 Januari 1974*. Jakarta: Publishing House Indonesia Inc.
- Atmakusumah. (1992). *Mochtar Lubis: Wartawan Jihad*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Cahyono, Heru. (1992). *Peranan Ulama dalam Golkar, 1971-1980: Dari Pemilu sampai Malari*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Cahyono, Heru. (1998). *Pangkobkamtib Jendral Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- "Catatan Pojok Dr. Clenik" dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 16 Januari 1974.
- "Catatan Pojok Dr. Clenik: Terlalu" dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 17 Januari 1974.
- "Catatan Pojok Dr. Clenik" dalam surat kabar

²⁰**Pernyataan:** Saya menyatakan, dengan ini, bahwa artikel dengan seluruh isi dan interpretasinya ini adalah karya saya sendiri. Artikel ini bukan hasil plagiat, sebab semua sumber yang saya kutip dalam analisis, tercantum secara jelas dalam Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim, direviu, apalagi diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya.

- Merdeka. Jakarta: 18 Januari 1974.
- “Catatan Pojok Dr. Clenik” dalam surat kabar Merdeka. Jakarta: 19 Januari 1974.
- “Catatan Pojok Dr. Clenik” dalam surat kabar Merdeka. Jakarta: 22 Januari 1974.
- “Catatan Pojok Dr. Clenik” dalam surat kabar Merdeka. Jakarta: 29 Januari 1974.
- Chaniago, J.R. et al. (1986). *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985*. Jakarta: Pustaka Merdeka.
- Crouch, Harold. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, Terjemahan.
- Elson, Robert E. (2001). *Suharto: A Political Biography*. Cambridge UK [United Kingdom]: Cambridge University Press.
- Elson, Robert. (2008). *Ideas of Indonesia*. Jakarta: Penerbit Serambi, Terjemahan.
- Fatah, Eep Saefullah. (1999). *Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Fauziah, Nurul. (2017). “Korupsi dalam Novel *Ladang Perminus* Karya Ramadhan K.H. dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/NURUL%20FAUZIAH-FITK.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2018].
- Gie, Soe Hok. (1983). *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Gottschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI [Universitas Indonesia], Terjemahan.
- “Harus Diselesaikan dengan Bijaksana”, tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 16 Januari 1974.
- Haryanto, Ignatius. (2006). *Indonesia Raya Dibredel*. Yogyakarta: Penerbit LKiS Pelangi Aksara.
- Hill, David T. (2010). *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author*. London: Routledge.
- Hill, David T. (2011). *Pers Masa Orde Baru*. Jakarta: Sinar Harapan, Terjemahan.
- “Ibu Tien dan Letupan-letupan Pemicu MALARI” dalam *TEMPO.CO*. Jakarta: 15 Januari 2014. Tersedia secara online juga di: <https://nasional.tempo.co/read/544935/ibu-tien-dan-letupan-letupan-pemicu-malari> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- “Indonesia Amat Lemah Menghadapi Jepang?”, tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 8 Januari 1974.
- Indonesia Raya* [surat kabar]. Jakarta: 10 Januari 1974.
- Indonesia Raya* [surat kabar]. Jakarta: 15 Januari 1974.
- Indonesia Raya* [surat kabar]. Jakarta: 16 Januari 1974.
- Indonesia Raya* [surat kabar]. Jakarta: 19 Januari 1974.
- Ismaun. (1988). *Pengantar Ilmu Sejarah: Diktat Perkuliahan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan].
- Jaya, Indra. (1997). “Koreksi demi Koreksi: Pergerakan Mahasiswa Indonesia Pasca MALARI sampai Penolakan NKK/BKK, 1974-1980”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Depok: Program Studi Sejarah FIPB UI [Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia].
- Jazimah, Ipong. (2013). “MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru” dalam *Jurnal AGASTYA*, Vol.03, No.01 [Januari]. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/902-1668-1-SM.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- “Jakarta Meledak”, berita utama surat kabar Merdeka. Jakarta: 16 Januari 1974.
- Jenkins, David. (2010). *Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru: Rezim Militer Indonesia, 1973-1983*. Depok: Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Kakiailat, Toeti. (1997). *B.M. Diah: Wartawan Serba Bisa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Khairani, Rivan Maulana. (2016). “Peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januari) Tahun 1974: Gerakan Mahasiswa Menentang Modal Jepang”. *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Sastra Jepang FIB UGM [Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada]. Tersedia secara online juga di: http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=99441&mod=penelitian [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- Lailah, Aas, Iskandar Syah & M. Syaiful. (2015). “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974”. Tersedia secara online di: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- Lasut, J. (2011). *MALARI: Melawan Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA*. Depok: Yayasan Penghayat Keadilan.
- Liliweri, Alo. (1991). *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Mochtar. (1974). “Pengalaman dengan Jepang Selalu Pahit”, tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 17 Januari.
- Lubis, Mochtar. (1993). *Bromocorah: Dua Belas Cerita Pendek*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Mahardhika, Galih. (2017). “Widjojo Nitisastro: Arsitek Ekonomi Orde Baru”. Tersedia secara

- online di: <https://suarakebebasan.org/id/resensi/item/816-widjojo-nitisastro-arisitek-ekonomi-orde-baru> [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2018].
- Makah, Masmimar. (1986). "Pojoek sebagai Penyalur Kritik" dalam *Seri Prisma: Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Malarangeng, Rizal. (1992). *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Harian Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- "Mas Kluyur", catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 15 Januari 1974.
- "Mas Kluyur", catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 16 Januari 1974.
- "Mas Kluyur", catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 17 Januari 1974.
- "Mas Kluyur", catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 18 Januari 1974.
- "Mas Kluyur", catatan pojok dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 21 Januari 1974.
- Mas'ood, Mohtar. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- May, Brian. (1978). *The Indonesia Tragedy*. London: Routledge and Kegan Paul.
- McDonald, H. (1980). *Suharto's Indonesia*. Australia: Fontana Books, Blackburn.
- McGlynn, John H. et al. (2007). *Indonesia in the Soeharto Years: Issue, Incidents, and Images*. Jakarta: KITLV Press.
- Merdeka* [surat kabar]. Jakarta: 9 Januari 1974.
- Merdeka* [surat kabar]. Jakarta: 10 Januari 1974.
- Merdeka* [surat kabar]. Jakarta: 15 Januari 1974.
- Merdeka* [surat kabar]. Jakarta: 16 Januari 1974.
- Merdeka* [surat kabar]. Jakarta: 17 Januari 1974.
- Merdeka* [surat kabar]. Jakarta: 19 Januari 1974.
- Merdeka* [surat kabar]. Jakarta: 22 Januari 1974.
- Muhaimin, Yahya. (1991). *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia, 1050-1980*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Nindarsari. (1984). *Implikasi Politik Penanaman Modal Jepang di Indonesia, 1970-1979*. Jakarta: Penerbit FISIP UI [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia].
- Noer, Deliar. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES [Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial].
- Notosusanto, Nugroho. (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Inti Indayu.
- Padiatra, Aditia Muara. (2012). "Korupsi dalam Tajuk Rencana: Analisis Sikap Harian Pedoman Awal Orde Baru, 1969-1974". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Depok: Program Studi Ilmu Sejarah FIPB UI [Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia]. Tersedia secara online juga di: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20308852> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- Padiatra, Aditia Muara. (2015). "Introduction to MALARI: Dari Situasi, Aksi, hingga Rusuh pada Awal Orde Baru, 1970 – 1974" dalam *Jurnal Criksetra*, Vol.4, No.8 [Agustus].
- Padiatra, Aditia Muara. (2017). "Melawan Korupsi Lewat Gambar: Visualisasi Kartun Editorial Pers Awal Orde Baru, 1968-1974". Tersedia secara online di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/caridokumen.com/melawan-korupsi-lewat-gambar> [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2018].
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto [eds]. (1985). *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahmat, M. Aref. (2011). *Ali Moertopo dan Dunia Intelijen Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Raillon, Francois. (1985). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru, 1966-1974*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Rais, M. Amien. (1986). *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Rajah, Budi. (2004). "Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh" dalam *Jurnal SOSIOHUMANIORA*, Vol.6, No.3 [November], hlm.182-202. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/5547-9083-1-PB.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- Ramadhan, K.H. (1990). *Ladang Perminus*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Ramadhan, K.H. (1994). *Soemitro, Mantan Pangkoptib: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkoptib*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklefs, M.C. (1992). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Terjemahan.
- Said, Tribuana. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pengembangan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- "Sejarah Berulang", tajuk rencana dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 22 Januari 1974.
- "Selamat Datang, Tanaka-san", tajuk rencana dalam surat kabar *Indonesia Raya*. Jakarta: 9 Januari 1974.
- Siegel, James T. (2000). *Penjahat Gaya (Orde Baru: Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, Terjemahan.
- Siregar, Hariman. (1998). *Refleksi Seorang (Mantan) Demontran dalam Menggusur Status Quo*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Sjamsuddin, Helius. (2002). "Rusuh di Bandung: Peristiwa 5 Agustus 1973 dalam Liputan Media Massa" dalam *HISTORIA: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol.III, No.6. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].

- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soebagijo, I.N. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Soeharto. (1989). *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Sudarta, G.M. (2007). *40 Tahun Om Pasikom: Peristiwa dalam Kartun, Tahun 1967-2007*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Surjomihardjo, Abdurrachman [ed]. (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Suseno, Franz Magnis. (1997). *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwardi, Harsono. (1993). *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Suwirta, Andi. (1998a). "Catatan Harian". *Tidak Diterbitkan*. Bandung: t.p. [tanpa penerbit].
- Suwirta, Andi. (1998b). "Krisis Moneter, Gejala Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah MIMBAR PENDIDIKAN*, No.4. Bandung: IKIP [Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan] Bandung Press.
- Suwirta, Andi. (2000). *Suara di Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), 1945-1947*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Suwirta, Andi. (2008). "Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.1, No.2 [November]. Tersedia secara online juga di: <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. SEJARAH> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- Suwirta, Andi. (2015). *Revolusi Indonesia dalam News & Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suwirta, Andi. (2017). "Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta" dalam *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 2(2), August, pp.101-122. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 2443-1776.
- Syuraida, Hikmatius. (2015). "Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama hingga Era Reformasi" dalam *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol.3, No.2 [Juli]. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/12011-15607-1-PB.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].
- Tasrif, S. et al. (1974). *Generasi Muda Indonesia Diadili: Membela Perkara Hariman Siregar*. Jakarta: t.p. [tanpa penerbit].
- Taufik, I. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Trinit Press.
- Toer, Pramudya Ananta. (1997). *Nyanyi Sunyi seorang Bisu*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Vatikiotis, Michael R.J. (1998). *Indonesian Politics Under Soeharto: The Rise and Fall of the New Order*. London: Routledge.
- Widjaja, A.W. (1993). *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiwoho, B. & B. Chaeruddin. (1995). *Memori Jenderal Yoga*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Yogaswara, A. (2009). *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI)*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].